

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Pemerintah yang baik atau *good governance* merupakan suatu bentuk keberhasilan dalam menjalankan tugas untuk membangun negara sesuai dengan tujuan yang telah direncanakan. Instansi pemerintah wajib melakukan pengelolaan keuangan serta mempertanggungjawabkan pelaksanaan keuangannya sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya yang didasarkan pada perencanaan strategis yang telah ditetapkan. Dalam rangka pertanggungjawaban tersebut diperlukan penerapan pelaporan keuangan yang tepat, jelas dan terukur sesuai dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas. Oleh karena itu diperlukan upaya reformasi dan pengembangan, khususnya di bidang akuntansi pemerintahan, yang berkesinambungan sehingga terbentuk suatu sistem yang tepat.

Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) merupakan standar atau panduan untuk menyajikan informasi keuangan yang berkualitas sebagai bentuk pertanggungjawaban pemerintah dalam melakukan pengelolaan keuangan negara. Hal ini dijelaskan dalam PP No.71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) bahwa Standar Akuntansi Pemerintahan adalah prinsip-prinsip akuntansi yang di terapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah. Dengan adanya dasar peraturan tentang standar akuntansi pemerintahan, pemerintah dituntut untuk dapat menerapkan dan mengimplikasikan standar akuntansi pemerintahan sebagai landasan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan yang baik dan berkualitas dalam rangka menciptakan terselenggaranya tata kelola pemerintahan yang baik.

Penerapan standar pelaporan akuntansi yang baik oleh instansi pemerintah menghasilkan laporan keuangan pemerintah yang baik sehingga akan meningkatkan akuntabilitas yang baik pula. Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah yang benar dan

pemahaman yang baik terhadap akuntansi keuangan daerah oleh pengelola keuangan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Tentunya akan meningkatkan kualitas laporan keuangan (Mardjuni dkk, 2022).

Dalam amanat Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003, pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), dalam Bab 1 ayat 2 disebutkan bahwa SAP merupakan prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah. Sehingga Standar Akuntansi Pemerintahan menjadi tolak ukur dijadikan pedoman pada setiap laporan akuntansi yang disajikan untuk mengetahui informasi mengenai posisi laporan keuangan, realisasi anggaran, arus kas serta kinerja keuangan yang berguna dan bermanfaat bagi pengguna dalam membuat dan mengevaluasi kinerja dan pengambilan keputusan.

Setiap negara menginginkan pemerintahan yang dapat berupaya untuk berpartisipasi dalam mewujudkan *Good Governance*. Salah satu prinsip strategis yang perlu dan harus dikembangkan saat ini adalah prinsip tata kelola keuangan. Untuk menciptakan prinsip tata kelola keuangan yang baik diperlukan penguatan sistem dan kelembagaan dengan berdasarkan pada peraturan perundang-undangan serta standar penyajian laporan keuangan yang berlaku.

Pemerintahan wajib melakukan pengelolaan keuangan sertamempertanggungjawabkan pelaksanaan keuangannya sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya yang didasarkan pada perencanaan strategis yang telah ditetapkan. Bentuk pertanggungjawaban tersebut diperlukan penerapan sistem pelaporan keuangan yang tepat, jelas, dan terukur sesuai dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas. Karena saat ini pemerintah daerah selaku organisasi masyarakat menjadi sorotan tajam publik yang harus dapat memberikan kepuasan terhadap masyarakat atau penduduk atas kinerja yang akan dicapai.

Pemerintah sebagai salah satu bentuk organisasi sektor publik memiliki tujuan umum untuk mensejahterakan rakyat. Guna mewujudkan hal tersebut rakyat membuat aturan umum

yang harus dipenuhi pemerintah berupa konstitusi atau undang-undang dalam pemerintahan (Hasanah, 2017). Dengan adanya otonomi daerah, pengelolaan keuangan sepenuhnya berada di tangan pemerintah daerah. Termasuk pembaharuan di dalam sistem pertanggungjawaban keuangan daerah yang selama ini digunakan oleh pemerintah daerah sejak lama, yaitu manual administrasi keuangan yang sudah tidak dapat lagi digunakan untuk mendukung kebutuhan pemerintah daerah untuk menghasilkan sebuah laporan keuangan secara sempurna. Sehingga diperlukan sebuah sistem pelaporan yang baik agar laporan keuangan dapat dihasilkan dan diterima oleh masyarakat serta pihak yang berkepentingan dengan menggunakan suatu Sistem Akuntansi Keuangan Daerah yang didasarkan pada Standar Akuntansi Pemerintahan.

Prinsip tata kelola keuangan yang baik akan mempengaruhi kinerja pemerintah yang menyajikan atau yang membuat laporan keuangan. Penyajian laporan keuangan yang baik didasarkan pada kinerja akuntabilitas yang menyampaikan serta membuat laporan keuangan tersebut. Berdasarkan peraturanperundangan berupa Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) yang merupakan salah satu upaya pemerintah untuk meningkatkan pelaksanaan pemerintah yang lebih berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab, Pamungkas (2012).

Pengawasan yang baik akan memastikan bahwa kegiatan yang direncanakan dapat berjalan dengan baik. Semakin baik pengawasan maka kinerja anggaran akan terlaksana sesuai dengan target kinerja. Sehingga pengelolaan keuangan daerah akan berjalan sesuai tujuan, rencana, aturan yang telah digariskan. Hermanto, (2021).

Pemerintah daerah wajib memperhatikan informasi yang disajikan dalam laporan keuangan untuk keperluan perencanaan, pengendalian, dan pengambilan keputusan. Perbaikan kualitas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah diharapkan akan berimplikasi pada minimalnya praktik korupsi sehingga diharapkan *good governance* dapat diwujudkan oleh Pemerintah di tingkat daerah.

Berdasarkan LAKIP kabupaten bireuen yang terjadi pada tahun 2021 menunjukkan bahwa pemerintah kabupaten bireuen belum sepenuhnya menindak lanjuti rekomendasi tahun 2020, sehingga belum terjadi peningkatan dalam implementasi SAKIP yang signifikan membuat Pemerintah Kabupaten Bireuen memperoleh nilai 52,54 atau predikat "CC". Penilaian tersebut menunjukkan bahwa tingkat efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran masih rendah jika dibandingkan dengan capaian kinerjanya. Yang dimana predikat CC >50-60 = Cukup memadai, dengan maksud yaitu terdapat gambaran bahwa AKIP cukup baik. Namun demikian, masih perlu banyak perbaikan walaupun tidak mendasar khususnya akuntabilitas kinerja pada unit kerja. Hal ini disebabkan kualitas pembangunan budaya kinerja birokrasi dan penyelenggaraan pemerintahan yang berorientasi pada hasil dipemerintah Kabupaten Bireuen masih belum berjalan dengan baik dan masih memerlukan perbaikan lebih lanjut. (bireuenkab.go.id).

Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah yang baik akan membawa sebuah akuntabilitas pertanggungjawaban pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada entitas pelaporan dalam mencapai misi dan visi yang telah ditetapkan. Selain itu akan membantu pemerintah daerah atau pengguna untuk mengevaluasi pelaksanaan dalam periode tertentu, sehingga dapat memberikan informasi kepada masyarakat secara terbuka dan jujur berdasarkan pertimbangan yang telah ditetapkan. Sebagaimana penelitian yang dilakukan Pamungkas (2012) bahwa dimana apabila kedua faktor itu diterapkan dengan baik sesuai dengan perundang undangan maka hasil yang akan dicapai akan maksimal.

Dengan demikian pelaporan keuangan dapat dengan mudah untuk diadakan pengawasan dan audit dari instansi/lembaga pemerintah yang berwenang atau dari pihak internal melalui Badan Pengawas Daerah (BAWASDA) dan BPKP serta pihak eksternal oleh BPK. Pengawasan internal pemerintah sangat diperlukan sebagai antisipasi terjadinya hal yang tidak diinginkan. Hal tersebut diharapkan akan dapat memperbaiki akuntabilitas instansi

pemerintah sehingga kinerja penyelenggaraan urusan-urusan pemerintahan dapat optimal dan akan berimplikasi.

Masalah lain dalam penelitian ini dilatar belakangi oleh perbedaan hasil dengan penelitian sebelumnya mengenai variabel yang mempengaruhi akuntabilitas instansi pemerintah. Pada penelitian ini faktor yang akan dijadikan sebagai bahan pertimbangan atau variabel independen dari akuntabilitas instansi pemerintah adalah penerapan standar akuntansi dan pengawasan kualitas laporan keuangan.

Penelitian-penelitian mengenai akuntabilitas instansi pemerintah telah banyak sebelumnya diteliti oleh para ahli. Seperti penelitian yang dilakukan oleh (Sari, dkk, 2023) dan (Makalag, dkk, 2023) Hasil penelitian menunjukkan Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Akuntabilitas Instansi Pemerintah. (Ramdhanu, 2019) dan (Nurcahya, 2024) secara parsial variabel pengawasan kualitas laporan keuangan mempengaruhi akuntabilitas instansi pemerintah. Namun berbanding terbalik dengan penelitian Nurkhasanah (2019) menyatakan pengawasan laporan keuangan tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas instansi pemerintah.

Penerapan akuntansi yang baik oleh instansi pemerintah serta pengawasan yang optimal dari pihak internal maupun pihak eksternal terhadap kualitas laporan keuangan instansi pemerintah diharapkan akan dapat memperbaiki akuntabilitas instansi pemerintah sehingga kinerja penyelenggaraan urusan-urusan pemerintah dapat optimal. Perbaikan terhadap kualitas akuntabilitas instansi pemerintah diharapkan akan berimplikasi pada minimalnya praktik korupsi sehingga diharapkan *good governance* dapat diwujudkan oleh pemerintah Indonesia baik tingkat pusat maupun tingkat daerah.

Dalam penelitian ini penulis mengambil studi pada Instansi Pemerintah Kabupaten Bireuen. Dalam konteksnya sebagai organisasi yang bergerak di bidang jasa pelayanan publik, pemerintahan dalam pengelolaannya harus melakukan transparansi dan akuntabilitas publik. Di bidang ekonomi perbaikan akuntabilitas instansi pemerintah akan mendorong perbaikan

iklim investasi, sedangkan di bidang politik perbaikan akuntabilitas instansi pemerintah akan mampu memperbaiki tingkat kepercayaan masyarakat kepada pemerintah.

Untuk mewujudkan akuntabilitas instansi pemerintah dibutuhkan transparansi terhadap masyarakat agar tidak memunculkan dampak negatif yaitu adanya ketidakadilan masyarakat, penyalahgunaan wewenang, menimbulkan kekacauan dalam alokasi sumber daya, dan memperbanyak kasus korupsi.

Berdasarkan latar belakang dan fenomena tersebut, peneliti tertarik untuk membuat penelitian tentang **“Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah dan Pengawasan Kualitas Laporan Keuangan terhadap Akuntabilitas Instansi Pemerintah (Studi kasus SKPD Kabupaten Bireuen)”**.

1.2 Rumusan Masalah Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah disebutkan di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Bagaimana pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah terhadap Akuntabilitas Instansi Pemerintah Kabupaten Bireuen?
- b. Bagaimana pengaruh Pengawasan Kualitas Laporan Keuangan Terhadap Akuntabilitas Instansi Pemerintah Kabupaten Bireuen?
- c. Bagaimana pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah dan Pengawasan Kualitas Laporan Keuangan terhadap Akuntabilitas Instansi Pemerintah Kabupaten Bireuen?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut.

- a. Untuk mengetahui apakah Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah berpengaruh Terhadap Akuntabilitas Instansi Pemerintah Kabupaten Bireuen.

- b. Untuk mengetahui apakah Pengawasan Kualitas Laporan Keuangan berpengaruh terhadap Akuntabilitas Instansi Pemerintah Kabupaten Bireuen.
- c. Untuk mengetahui apakah Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah dan Pengawasan Kualitas Laporan Keuangan Berpengaruh terhadap Akuntabilitas Instansi Pemerintah Kabupaten Bireuen.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut.

- a. Bagi Universitas; Penelitian ini sebagai bahan masukan untuk menambah karya tulis ilmiah yang dapat dijadikan literatur dalam penelitian selanjutnya yang ada hubungannya dengan penelitian.
- b. Bagi Peneliti; Dapat dijadikan wadah untuk mengaplikasikan ilmu yang diperoleh selama perkuliahan dan menambah wawasan ilmu tentang pengaruhpenerapan standar akuntansi pemerintah dan pengawasan kualitas laporan keuangan terhadap akuntabilitas Instansi pemerintah, serta membandingkan teori dengan prakteknya.
- c. Bagi Pemerintah; Sebagai bahan masukan dalam mendukung pelaksanaan tugas otonomi daerah khususnya sebagai pertimbangan dalam pengelolaan keuangan daerah dan informasi dalam mengambil kebijakan penerapan standar akuntansi pemerintah dan pengawasan kualitas laporan keuangan, yang nantinya berhubungan dengan akuntabilitas instansi pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitasnya.
- d. Bagi peneliti yang akan datang; Diharapkan dapat memperoleh pemahaman, memperluas wawasan, pengetahuan dan pengalaman sebelum terjun ke bidang yang sesungguhnya dalam bidang penelitian standar pelaporan akuntansi.